

Analisa Partisipasi Pemangku Kepentingan pada Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

Nafiah Ariyani¹, Akhmad Fauzi², Farhat Umar³

^{1,3}Universitas Sahid Jakarta

²Institut Pertanian Bogor

Abstract

The success of tourism development requires the participation of all stakeholders. To build involvement necessary to know the conditions that encourage the growth of interest in participating. This study aims to determine the determinants of stakeholder participation and stratification based on their interest in being involved in developing the tourist area of Kedung Ombo. This study uses a mixed-method paradigm to reach comprehensive information related to ex-ante cases. Data collection used focus group discussion method and questionnaire. The data analysis used the Qualitative Comparative Analysis (QCA) method, assisted by the Tosmana software version 1.52. The results show that there are four pathways to form stakeholder participation, namely: 1. They are building a correct mindset towards tourism, accompanied by ownership of capacity and confidence in tourist areas' ability to facilitate common interests. 2. Stakeholders have good capacity in human resources, budget, technical support, and development of tourist attractions. 3. Building the right mindset towards tourism, accompanied by good relationships between stakeholders. Among several stakeholders, Perhutani Telawah, Bappeda Sragen, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sragen and Tourism College are the institutions with the highest interest in involvement. These findings can be the basis for developing a participatory policy for developing Kedung Ombo tourist destinations.

Keywords: Kedung Ombo, participation, stakeholders; QCA

Abstrak

Keberhasilan pengembangan pariwisata memerlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Untuk membangun keterlibatan perlu diketahui kondisi yang mendorong tumbuhnya minat untuk berpartisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu partisipasi dan stratifikasi pemangku kepentingan berdasarkan minat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo. Penelitian ini menggunakan paradigma *mix method* untuk menjangkau informasi secara komprehensif terkait dengan kasus yang bersifat *ex ante*. Pengumpulan data menggunakan metode diskusi kelompok fokus dan kuesioner. Analisa data menggunakan metode Qualitative Comparative Analysis (QCA) yang dibantu oleh perangkat lunak Tosmana versi 1.52. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat jalur untuk membentuk partisipasi pemangku kepentingan, yaitu: 1. Membangun pola pikir yang benar terhadap pariwisata, disertai dengan kepemilikan kapasitas dan keyakinan terhadap kemampuan kawasan wisata dalam memfasilitasi kepentingan bersama. 2. Pemangku kepentingan mempunyai kapasitas yang baik dalam sdm, anggaran, dukungan teknis dan pengembangan atraksi wisata. 3. Membangun pola pikir yang benar terhadap pariwisata disertai dengan hubungan antar pemangku kepentingan yang baik. Diantara sejumlah pemegang kepentingan, Perhutani Telawah, Bappeda Sragen, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Sragen dan Perguruan Tinggi Pariwisata adalah lembaga yang mempunyai minat terlibat paling tinggi. Temuan ini dapat menjadi dasar dalam mengembangkan kebijakan pengembangan destinasi wisata Kedung Ombo secara partisipatif.

Kata kunci: Kedung Ombo; partisipasi, pemegang kepentingan; QCA

1. PENDAHULUAN

Isu tentang keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) pada pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi topik dan konsep penting seiring dengan dinamika desentralisasi pengambilan kebijakan publik yang semakin melibatkan banyak pihak. Partisipasi, komitmen, tanggungjawab, rasa memiliki dari para pemangku kepentingan merupakan kunci untuk membangun sinergi dan konvergensi yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola destinasi pariwisata yang baik. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa pengembangan pariwisata yang berhasil lahir dari perencanaan yang cermat yang didukung oleh partisipasi seluruh pemangku kepentingan (Siti-Nabiha & Md Saad, 2015).

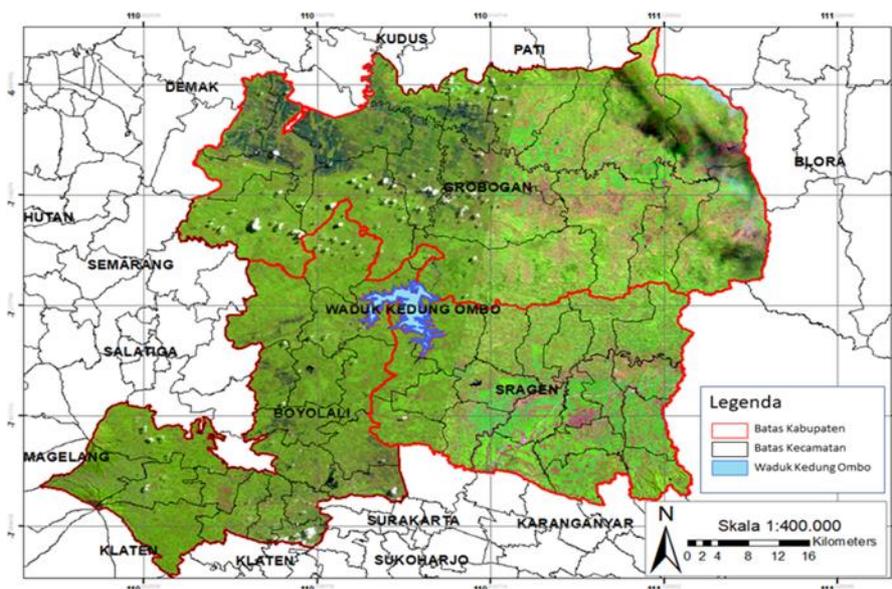
(McComb, Boyd, & Boluk, 2017) menyatakan salah satu kunci keberhasilan dan implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah dukungan dari stakeholders. Pelibatan berbagai elemen pemangku kepentingan diperlukan pada seluruh proses pengembangan pariwisata sejak perencanaan melalui pendekatan perencanaan partisipatif hingga tahap operasi dan evaluasi. Partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan akan membantu mengurangi konflik kepentingan berkaitan dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam sistem pariwisata (Bramwell & Sharman, 1999). Charleen & Forbes (2014) menyatakan pelibatan pemangku kepentingan akan membantu mengembangkan komitmen dan kapasitas kolektif untuk mengubah ide dan rencana menjadi sebuah tindakan nyata. Sementara (Fathimath, 2015) menyatakan, pelibatan pemangku kepentingan akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik, mewujudkan alokasi sumber daya yang lebih baik dan meningkatkan kapasitas operasionalisasi destinasi pariwisata.

Sebagai bidang yang mempunyai karakteristik multidimensional (meliputi multi sektor, multi aktor, multi wilayah dan multi aspek), kompleksitas dan ketidakpastian sangat mewarnai sektor pariwisata. Oleh karena itu, keterlibatan pemangku kepentingan melalui proses pengambilan keputusan partisipatif dianggap sebagai tonggak yang tepat dalam pengambilan langkah kebijakan pada sektor pariwisata (Leal Filho & Londero Brandli, 2016). Partisipasi pemangku kepentingan tidak hanya akan menghasilkan keputusan yang responsif terhadap kepentingan dan stakeholders value, tetapi juga membantu menyelesaikan konflik, membangun kepercayaan dan mendidik tentang lingkungan (Gregory, Atkins, Midgley, & Hodgson, 2020). Namun demikian, sementara kesadaran tentang perlunya keterlibatan semakin tumbuh dalam faktanya hal itu menjadi kompleks, sulit bahkan seringkali gagal (McComb et al., 2017). Kekurangan pemahaman tentang implikasi dari keterlibatan serta bagaimana memperbaiki prosesnya menjadi tantangan sendiri. Pada penelitiannya di Penang Malaysia, Siti Nabiha & M.d Saad menemukan bahwa proses pelibatan pemangku kepentingan rumit dan bermasalah. Penyebab utamanya adalah ketidakjelasan tentang peran dan tanggung jawab dari banyak entitas yang terlibat serta kurangnya strategi yang jelas baik di tingkat negara bagian maupun lokal (Siti-Nabiha & Md Saad, 2015).

(Kala & Bagri, 2018) mengidentifikasi faktor-faktor yang diperkirakan menghambat keberhasilan pendekatan partisipatif. Pertama, kurangnya kemauan politik pengambil kebijakan pada tahap perencanaan karena implikasinya terhadap distribusi kekuatan dan sumber daya. Kedua, kurangnya partisipasi dan kesadaran dari pemangku kepentingan pada tahap pelaksanaan. (Kurniasih, 2017) menyatakan praktik konsep partisipasi membutuhkan beberapa prasyarat, yaitu jejaring yang kuat, tingkat kepercayaan yang memadai, dan akuntabilitas dari masing-masing aktor. (Tosun, 2006) menyatakan tantangan dalam implementasi konsep partisipasi pemangku kepentingan lebih menguat di negara berkembang dibandingkan negara maju karena sifatnya yang "tokenistic". Pernyataan ini menjadi tantangan yang harus dijawab dalam pengembangan pariwisata di Indonesia.

Paper ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan partisipasi pemangku kepentingan pada pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo yang melibatkan banyak pihak. Waduk Kedung Ombo merupakan bendungan terbesar se Asia (6.576 Ha yang terdiri dari lahan perairan seluas 2.830 Ha dan lahan dataran seluas 3.746 Ha). Waduk ini terletak di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali (Gambar 1). Waduk Kedung Ombo dibangun pada pertemuan Sungai Uter dan Sungai Serang yang terletak di Dukuh Kedungombo, Desa Ngrambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Kawasan waduk Kedung Ombo sangat ideal untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, terkait dengan topografi hutan yang sangat luas, udara yang sejuk dan panorama yang indah. Keberadaan kawasan wisata akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan infrastruktur, kegiatan ekonomi dan lapangan kerja sekaligus menjadi sumber peningkatan pendapatan daerah di kawasan ini. Upaya untuk memanfaatkan potensi pariwisata sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa pihak, namun skalanya terbatas, kurang menarik dan tidak berkelanjutan sehingga memerlukan pembenahan.

Untuk memanfaatkan potensi wisata kawasan Kedung Ombo secara optimal, diperlukan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka kerjasama secara integratif dan saling menguntungkan. Dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, proses pengembangan akan didukung oleh sumber daya, kapasitas serta pemikiran yang cukup sehingga keberhasilan dan keberlanjutannya relatif terjamin. Perbedaan misi, kapasitas dan lemahnya koordinasi mengakibatkan sulitnya mengembangkan potensi wisata kawasan ini dikembangkan secara bersama oleh semua pihak.



Gambar 1. Peta Lokasi Waduk Kedung Ombo

Partisipasi para pemangku kepentingan pada pengembangan pariwisata bukan suatu keadaan yang terjadi secara otomatis, namun perlu dibangun dan dikembangkan. Partisipasi juga dipengaruhi oleh banyak faktor dan berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya. Maka, diperlukan upaya sistematis untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan partisipasi dan bagaimana partisipasi pemangku kepentingan dibentuk. Untuk itu penelitian ini akan mengembangkan model kausalitas antara faktor-faktor yang menentukan terbentuknya partisipasi dengan tingkat partisipasi para pemangku kepentingan di kawasan ini. Penelitian ini menjadi penting karena keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen utama untuk mewujudkan pengembangan destinasi wisata Kedung Ombo yang berhasil dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN TEORI

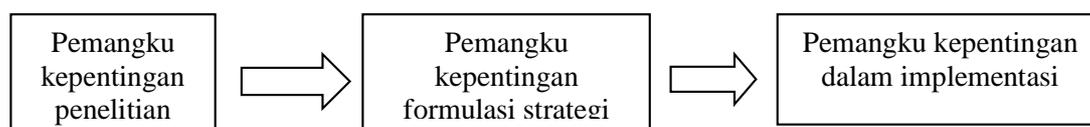
Partisipasi pemangku kepentingan dapat dideskripsikan sebagai proses dimana seluruh aktor pemangku kepentingan dari suatu sistem dapat terlibat dan membentuk inisiatif pada proses pengembangan suatu sistem. Dua kata yang dekat dengan partisipasi adalah keterikatan (engagement) dan keterlibatan (involvement) yang mencerminkan intensitas dari partisipasi. Agar partisipasi pemangku kepentingan dapat terwujud maka antusiasme terhadap pola kerja kemitraan, keterikatan dan keterlibatan harus dipupuk dengan sungguh-sungguh (Arifin, 2018).

Mengadopsi pemikiran Freeman (1984), pemangku kepentingan pariwisata adalah kelompok atau individu apa saja yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata di suatu daerah. Sesuai karakteristiknya, pemangku kepentingan adalah entitas yang mempunyai kebebasan untuk menetapkan tujuan sendiri dan melakukan tindakan strategis untuk mencapai tujuan tersebut (Heger & Rohrbeck, 2012). Independensi pemangku kepentingan tersebut menjadi salah satu faktor sulitnya pemangku kepentingan berkomitmen terhadap kerja kolaboratif karena tujuan yang seringkali saling berbenturan (Baggio, Scott, & Cooper, 2010).

Agar partisipasi para pemangku kepentingan dapat dibangun maka diperlukan batasan yang jelas tentang ruang lingkup keterlibatan dan bagaimana proses partisipasi tersebut diidentifikasi (Stratigea, 2013). Beberapa faktor berikut ini dapat dijadikan pertimbangan. Pertama, tidak semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan secara setara, tetapi perlu diidentifikasi dan dipahami keterkaitan seluruh pemangku kepentingan dengan misi pengembangan (Donaldson, T. & Preston, 1995). Kedua, partisipasi pemangku kepentingan bervariasi sesuai tujuan dan harapan masing-masing pemangku kepentingan (Tosun, Hatay, & Timothy, 1998). Ketiga, luasnya ruang lingkup keterlibatan kepentingan pemangku kepentingan harus diidentifikasi karena mengakibatkan kegagalan proses pengembangan (Clarkson, 1995). Keempat, tingkat partisipasi harus disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan dan minat untuk berkolaborasi dari masing-masing pemegang kepentingan (Gray, 1989).

Keterlibatan pemangku kepentingan memegang peranan penting sejak tahap pembuatan kebijakan hingga tahap implementasi proyek (Turker, Alaeddinoglu, & Can, 2016). Menurut (Charleen & Forbes, 2014), keterlibatan pemangku kepentingan akan melibatkan kolaborasi dan konsultasi oleh pemangku kepentingan sejak menyusun langkah-langkah bagaimana pengembangan pariwisata terbaik dapat dicapai hingga tahap operasionalisasi destinasi wisata. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan akan menguat jika para pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk berpartisipasi mulai sejak awal proses seiring dengan berkembangnya budaya berbagi informasi dan saling konsultasi antar pemangku kepentingan (Bramwell & Sharman, 1999).

Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan kemungkinan berbeda, tergantung pada potensi kelembagaan masing-masing (Donaldson, T. & Preston, 1995). Beberapa pemangku kepentingan mungkin hanya bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, sementara yang lain menerapkan kebijakan pariwisata (Miller, Rathouse, Scarles, Holmes, & Tribe, 2010). Terkait dengan hal itu, (Charleen & Forbes, 2014) membedakan pemangku kepentingan dalam tiga tingkatan yang harus saling terhubung guna mewujudkan pengembangan pariwisata yang berhasil (Gambar 2).



Gambar 2. Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Pariwisata (Charleen & Forbes, 2014)

Meskipun partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata telah dijalankan di berbagai negara maju, namun di negara-negara berkembang ditemukan bahwa praktik tersebut bersifat asal-asalan (tokenistic) (Tosun, 2000). Studi (Ruhanen, 2012) tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Queensland menemukan bahwa partisipasi publik yang bersifat tokenistik di disebabkan peran dan kekuatan pemerintah daerah yang terlalu kuat dan justru bertindak sebagai penghalang bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berbeda antar berbagai negara dan tergantung pada banyak elemen. Hasil penelitian di Thailand menunjukkan faktor-faktor penentu partisipasi pemangku kepentingan adalah modal sosial dan kepercayaan politik (Hemaphan, 2017). Hasil penelitian di County Cornwall Inggris faktor-faktor kunci yang memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan adalah kualitas kepemimpinan, kualitas dan aksesibilitas informasi, dan prioritas implementasi. Sedangkan faktor-faktor yang meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan adalah pola pikir pemangku kepentingan, kapasitas keterlibatan, hubungan antar pemangku kepentingan dan kemampuan beradaptasi pemangku kepentingan (Waligo, Clarke, & Hawkins, 2013)

Penelitian di Penang Malaysia menemukan faktor penghalang partisipasi pemangku kepentingan adalah sumber daya keuangan yang tidak memadai, keterbatasan keahlian-pengalaman dan kompetensi, otoritas perencanaan pariwisata, dan kurangnya komitmen. Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan keterlibatan pemangku kepentingan adalah tingkat kesadaran yang rendah, perasaan tidak berdaya, masalah yang terkait dengan koordinasi dan birokrasi, kerapuhan kepentingan bersama, ketidakmampuan pemangku kepentingan untuk mengklarifikasi tujuan, dan keengganan untuk membuat perubahan signifikan terhadap perilaku adalah (Siti-Nabiha & Md Saad, 2015).

Temuan penelitian pada perencanaan pariwisata di Kepulauan Langkawi, Malaysia, menunjukkan faktor yang menghambat partisipasi adalah informasi yang tidak memadai, pendekatan yang tidak efektif, sikap penduduk, dan pengecualian pada proses partisipasi. Partisipasi publik juga hanya terjadi pada tahap awal proses perencanaan yang disebabkan keterbatasan struktural dan operasional (Marzuki, Hay, & James, 2012). Sementara penelitian yang dilakukan di Morness Irlandia Utara, menemukan alasan kurangnya keterlibatan dan kolaborasi pemangku kepentingan adalah kurangnya pemahaman terhadap pariwisata, kurangnya kekuatan dalam pengambilan keputusan, tidak adanya pendekatan jangka panjang menuju kolaborasi, dan kurangnya visi dan tujuan bersama (McComb et al., 2017).

Penelitian di Wales Inggris menemukan faktor penghambat partisipasi adalah pendekatan pengambilan kebijakan top-down peluang pemangku kepentingan 'akar rumput' untuk berpartisipasi menjadi sangat terbatas (Maiden, 2008). Penelitian di Queensland Australia, menemukan motivasi untuk membangun kolaborasi sangat terkait dengan kepemilikan sumber daya dan hubungan antar pemangku kepentingan, sementara komunikasi dan kepercayaan yang konsisten antar pemangku kepentingan menjadi elemen kunci terbangunnya kolaborasi yang efektif, dan persaingan dan hubungan di masa lalu yang buruk merupakan hambatan utama kolaborasi (Jiang & Ritchie, 2017).

(Charleen & Forbes, 2014) mengidentifikasi faktor-faktor yang utama yang membentuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, yaitu: (1) kesadaran terhadap konteks partisipasi; (2) kesadaran terhadap ragam tingkat partisipasi dan integrasi secara vertikal dan horizontal; (3) komitmen untuk mengembangkan partisipasi serta struktur koordinasi; (4) pengembangan pola kemitraan untuk memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang lebih luas dan efektif. Berbagai hasil penelitian tersebut dapat menjadi rujukan

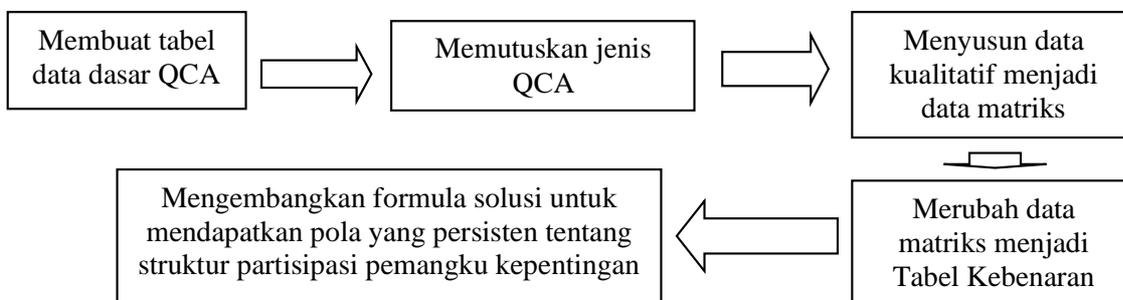
dalam melakukan pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma prospektif kualitatif-kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode untuk mengeskplorasi situasi saat ini sekaligus menjangkau kemungkinan pada masa yang akan datang. 1. Diskusi Kelompok Fokus (FGD), untuk menentukan faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat partisipasi pemangku kepentingan. 2.Wawancara mendalam dengan informan terpilih untuk mengetahui pandangan/penilaian/atau pendapat tentang ide pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo, kemungkinan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dan wilayah, hubungan antara pemangku kepentingan, dan minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan. 3. Kuesioner untuk mengumpulkan data tentang ketersediaan anggaran/dana dan SDM pariwisata dari para pemangku kepentingan. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup menggunakan rating scale dengan nilai 1-2 - 3 - 4 -5 (sangat kurang- kurang-sedang-baik- baik sekali).

Analisa data menggunakan metode Qualitatif Comparative Analysis (QCA) dibantu dengan software Tosmana versi 1.54. QCA merupakan cara baru untuk melakukan penelitian tentang femomena sosial yang menggabungkan kekuatan metode kuantitatif dan kualitatif. QCA digunakan untuk mengkaji bagaimana suatu outcome dapat dicapai melalui interaksi variabel atau faktor yang mempengaruhinya (Fauzi, 2019). QCA sangat sesuai untuk mempelajari situasi di mana peneliti memiliki keyakinan bahwa suatu outcome kemungkinan merupakan hasil dari beberapa jalur sebab akibat kondisi yang berbeda, dan suatu kondisi mungkin hanya muncul efek kausalnya dalam kombinasi dengan kondisi lain (Devers et al., 2013). Secara prinsip metode QCA adalah metode perbandingan sistematis antar kasus (case base comparison) yang ditujukan untuk memahami faktor-faktor kualitatif apa (dalam istilah QCA disebut kondisi) yang mempengaruhi hasil yang diinginkan (outcome) (Fauzi, 2019).

Pada penelitian ini metode QCA digunakan untuk menemukan formula dan struktur kausalitas antara tingkat partisipasi pemangku kepentingan di kawasan Kedung Ombo dengan faktor-faktor pembentuknya, dan menentukan tipologi pemangku kepentingan berdasarkan kondisi dan tingkat partisipasi tersebut. Adapun tahapan analisa data berdasarkan pendekatan QCA adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Tahapan Pendekatan QCA

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

FGD yang dilakukan telah menemukan empat faktor atau kondisi yang diidentifikasi mempengaruhi partisipasi pemangku kepentingan di kawasan Kedung Ombo, yaitu: 1. pola pikir pemangku kepentingan terhadap pariwisata, 2. kapasitas pemangku kepentingan dalam penyediaan, SDM, anggaran, dukungan teknis, dan kemampuan dalam pengembangan atraksi wisata, 3. hubungan antar pemangku kepentingan, dan 4. keyakinan pemangku kepentingan bahwa keberadaan kawasan ekowisata dapat memenuhi kepentingan semua pihak.

Hasil FGD, wawancara dan tanggapan responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner kemudian dielaborasi oleh peneliti menjadi data awal penelitian ini (Tabel 1). Dataset Tabel 1 menggambarkan minat berpartisipasi dari 15 pemangku kepentingan (kolom 1, jumlah pemangku merupakan hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan antar pemangku kepentingan di kawasan Kedung Ombo), berdasarkan empat faktor penentu partisipasi. Kondisi pemangku kepentingan diukur dengan skala 1-5 (sangat tidak baik - baik sekali) dan data minat partisipasi pemangku kepentingan dinilai dengan skala 1 atau 0 (tidak berpartisipasi atau berpartisipasi).

Dari data awal diketahui kompleksitas hubungan antara kondisi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam kasus ini. Untuk mendapatkan hubungan yang bermakna antara berbagai kondisi dan tingkat partisipasi yang bervariasi tersebut, maka data pada Tabel 1 dikalibrasi dengan nilai tertentu sebagai threshold dan diolah oleh software Tosmana sebagai data QCA. Hasil proses kalibrasi ditunjukkan pada Tabel 1, dimana angka dalam kurung merupakan data awal (raw data), sedangkan angka di depannya (0 dan 1) adalah data hasil kalibrasi.

Tabel 1. Kondisi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

Pemangku Kepentingan	Pola pikir	Kapasitas	Hubungan	Minat Bersama	Partisipasi
BBWS Pemalijuana	0 (3)	1(4)	0 (2)	0 (3)	1(1)
Perhutani Gundih	1(4)	1(3)	1 (4)	1 (4)	1 (1)
Perhutani Telawah	1 (4)	1 (4)	1 (4)	1 (4)	1 (1)
Bappeda Grobogan	1 (4)	1 (4)	1 (3)	1 (4)	1 (1)
Bappeda Boyolali	0 (2)	1 (4)	0 (3)	0 (2)	0 (0)
Bappeda Sragen	1 (5)	1 (4)	0 (2)	1 (5)	1 (1)
Dinpar Grobogan	0 (4)	1 (3)	0 (2)	1 (4)	1 (1)
Dinpar Boyolali	0 (2)	1 (3)	1 (3)	0 (2)	0 (0)
Dinpar Sragen	1 (4)	1 (3)	0 (2)	1 (4)	1 (1)
Masyarakat Lokal	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (3)	1 (1)
Pengusaha	0 (3)	0 (2)	1(3)	0 (3)	0 (0)
Perguruan Tinggi Umum	1 (4)	1 (4)	1 (3)	0 (2)	0 (0)
Perguruan Tinggi Pariwisata	1 (4)	0 (2)	1 (3)	0 (3)	1 (1)
Pemerintah Desa	0 (2)	0 (1)	0 (2)	1 (4)	1 (1)
Karang Taruna	0 (3)	0 (1)	1 (3)	1(4)	1 (1)

Sumber: Tosamana Kedung Ombo

Data hasil kalibrasi selanjutnya diolah menggunakan metode *multivalued analysis* (mvQCA) untuk menggambarkan kombinasi kausal antara berbagai variasi kondisi dengan minat berpartisipasi. Pilihan jenis mvQCA berkaitan dengan jenis data penelitian ini yang bersifat ordinal. Sesuai konsep QCA, mvQCA merupakan model yang paling tepat pada penelitian yang menggunakan data ordinal (Fauzi, 2019).

Hasil analisis mvQCA ditampilkan pada Tabel Kebenaran (Tabel 2) yang meringkas kombinasi hubungan kausalitas antara kondisi dengan minat berpartisipasi para pemangku kepentingan. Tabel Kebenaran berguna untuk mengidentifikasi kombinasi kondisi mana yang menyebabkan minat partisipasi positif, kombinasi mana yang menyebabkan minat partisipasi negatif atau yang menyebabkan minat berpartisipasi yang beragam (ditunjukkan dengan "C"). Tabel Kebenaran membantu memperjelas dan menyederhanakan ekspresi kompleks dari konfigurasi sebab akibat dari kondisi yang menghasilkan minat berpartisipasi.

Tabel 2. Tabel Kebenaran Partisipasi Pemangku Kepentingan Pengembangan Kawasan wisata Kedung Ombo

Pola Pikir	Kapasitas	Hubungan	Kepentingan Bersama	Partisipasi	Pemangku Kepentingan
0	0	0	0	1	Masyarakat lokal
0	0	0	1	1	Pemerintah Desa
0	0	1	0	0	Pengusaha
0	0	1	1	1	Karang Taruna
0	1	0	0	1	BBWS Pemalijuana
0	1	1	0	0	Bappeda Boyolali, Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata Boyolali
1	0	1	0	1	Perguruan Tinggi Pariwisata
1	1	0	1	1	Bappeda Sragen, Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata Sragen Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata Grobogan
1	1	1	0	0	Perguruan Tinggi Umum
1	1	1	1	1	Perhutani Gundih, Perhutani Telawah, Bappeda Grobogan

Sumber: Tosmana Kedung Ombo

Berdasarkan Tabel Kebenaran diketahui 10 (delapan) variasi klasifikasi hubungan antara kondisi dengan minat berpartisipasi. Tabel Kebenaran menunjukkan bahwa 11 (sebelas) pemangku kepentingan berminat berpartisipasi, 4 (empat) pemangku kepentingan yang tidak berminat berpartisipasi, dan tidak ada pemangku kepentingan yang kontradiksi.

Fenomena khusus yang dapat diketahui dari Tabel kebenaran adalah tipologi dari Bappeda Boyolali dan Dinas Pemuda-Olah Raga Pariwisata Boyolali meskipun kedua lembaga pemerintah ini memiliki kondisi yang cukup baik pada kapasitas dan hubungan, namun tidak berminat untuk berpartisipasi. Dari FGD diketahui bahwa penyebab tidak berpartisipasi adalah kedua lembaga tersebut sedang fokus pada pengembangan pariwisata di sisi selatan wilayah Kabupaten Boyolali (kawasan Kedung Ombo berada di wilayah utara Kabupaten Boyolali). Perguruan tinggi umum juga tidak berminat berpartisipasi dalam pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo dikarenakan telah mempunyai wilayah binaan pengembangan pariwisata

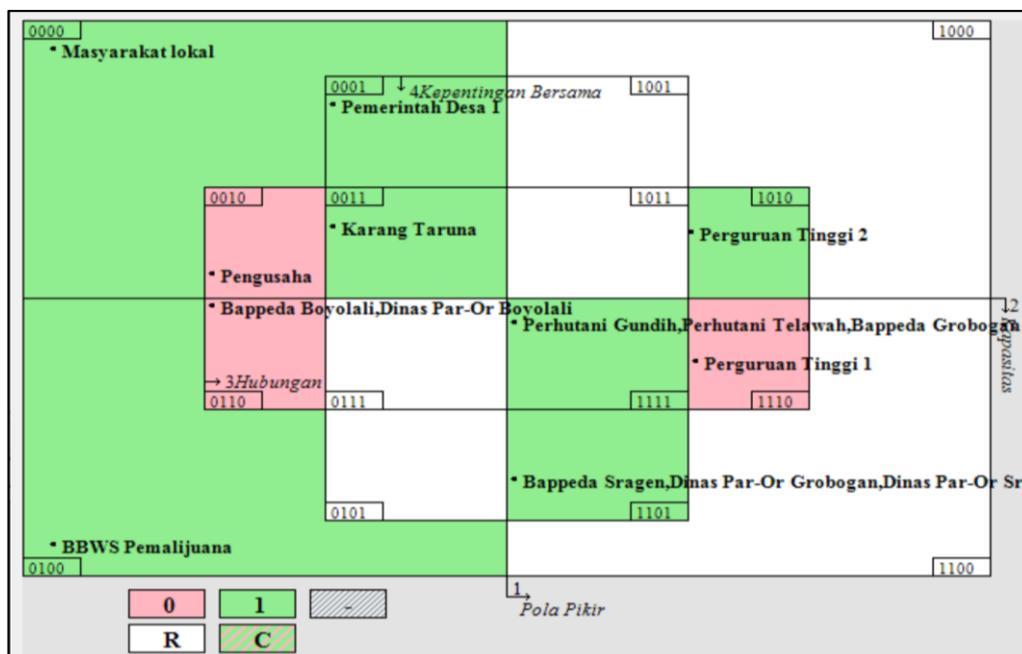
lainnya. Sedangkan alasan pengusaha tidak berminat berpartisipasi dikarenakan anggapan bahwa investasinya terlalu besar untuk proyek Kedung Ombo ini.

Berdasarkan temuan tersebut maka agar pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo didukung oleh seluruh *stakeholder*, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kondisi yang terjadi pada pemangku kepentingan dengan tipologi 0. Upaya-upaya yang dikembangkan haruslah memotivasi agar mereka menjadi pemangku kepentingan yang berpartisipasi.

Tabel Kebenaran juga menjelaskan tentang alternatif struktur hubungan antara kondisi pemangku kepentingan dengan minat untuk berpartisipasi sebagai berikut:

- Partisipasi pemangku kepentingan ditentukan oleh Pola Pikir, Kapasitas, Kepentingan Bersama
- Partisipasi pemangku kepentingan ditentukan oleh Kepentingan Bersama
- Partisipasi Pemangku Kepentingan ditentukan oleh Pola Pikir, Hubungan

Dari formulasi tersebut diketahui bahwa minat berpartisipasi akan muncul dengan sendirinya jika pemangku kepentingan mempunyai pola pikir yang benar terhadap pariwisata, mempunyai kapasitas SDM, anggaran, dukungan teknis dan kemampuan dalam pengembangan atraksi wisata memadai dan keyakinan bahwa kawasan wisata kemampuan memfasilitasi kepentingan bersama seluruh *stakeholder*. Minat berpartisipasi juga akan muncul jika kawasan wisata mampu memfasilitasi kepentingan bersama meskipun pola pikir dan kapasitas pemangku kepentingan dibawah *threshold* yang ditentukan. Selanjutnya, minat berpartisipasi akan muncul jika pemangku kepentingan mempunyai pola pikir yang benar terhadap pariwisata dan mempunyai hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya baik, meskipun nilai kondisi lainnya di bawah *threshold*. Tipologi pemangku kepentingan yang telah diuraikan pada Tabel kebenaran dapat divisualisasi melalui diagram Venn pada Gambar 4.



Gambar 4 Diagram Venn Partisipasi Pemangku Kepentingan
 Sumber: Luaran Tosmana Kedung Ombo

Gambar 4 berguna untuk mengetahui nilai dari tiap-tiap kondisi (atau faktor) yang menentukan partisipasi serta posisi pemangku kepentingan terhadap kondisi tersebut. Dari

Gambar 4 diketahui bahwa faktor pola pikir terbagi dalam dua sisi (garis vertikal), sisi sebelah kiri menunjukkan kondisi pola pikir dengan nilai 0 (negatif), sedangkan sisi sebelah kanan menunjukkan nilai "1" (positif). Garis tengah horizontal menggambarkan kondisi kapasitas pemangku kepentingan yang terbagi dalam dua bagian, yaitu sisi sebelah bawah menggambarkan kapasitas = 1 (baik), dan sisi sebelah atas menggambarkan nilai kapasitas = 0 (buruk). Kotak di tengah horizontal menggambarkan kondisi hubungan, dimana area di dalam kotak tengah menggambarkan nilai hubungan = 1 (baik), sedangkan area di luar kotak tengah menggambarkan nilai hubungan = 0 (buruk). Sementara, kotak tengah vertikal menggambarkan keberadaan kawasan dapat memfasilitasi kepentingan bersama, dimana area di dalam kotak tengah menggambarkan nilai kepentingan bersama = 1 (dapat memfasilitasi kepentingan bersama), sedangkan area di luar kotak tengah vertikal menggambarkan nilai kepentingan bersama = 0 (tidak dapat memfasilitasi kepentingan bersama).

Legenda di bawah diagram Venn menunjukkan nilai *outcome* (partisipasi), dimana nilai 0 menggambarkan tidak ada berminat untuk berpartisipasi, sedangkan nilai 1 menunjukkan sangat berminat untuk berpartisipasi. Sedangkan simbol C menggambarkan *outcome* yang kontradiktif, artinya sebenarnya pemangku kepentingan mempunyai kondisi yang memungkinkan untuk berpartisipasi namun pada kenyataannya tidak menjalankannya. Sedangkan simbol R menunjukkan *outcome remainder*, yang berarti secara empiris kondisi pemangku kepentingan tidak mendukung untuk berpartisipasi namun secara teori memungkinkan.

Berdasarkan kaidah pemosisian pemangku kepentingan tersebut maka dapat diketahui posisi partisipasi para pemangku kepentingan pada pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo. Sebagian besar pemangku kepentingan ada di area hijau yang berarti mendukung atau berminat berpartisipasi dalam pengembangan sesuai dengan kondisi masing-masing (dilihat dari kode-kode angka pada area diagram Venn).

Adapun fenomena khusus yang harus dicermati adalah pada pengusaha, Bappeda Boyolali, Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Boyolali berada pada area 0 (warna pink), dengan kondisi pengusaha pada 0010, Bappeda Boyolali, Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Boyolali pada kondisi 0010 dan perguruan tinggi umum pada 1110. Posisi ini menunjukkan bahwa kelompok pemangku kepentingan ini tidak berminat untuk berpartisipasi. Hal ini disebabkan kondisi yang dipersyaratkan untuk nilainya 0 atau kurang dari nilai *threshold*. Kondisi ini menggambarkan bahwa pola pikir pemangku kepentingan terhadap keberadaan kawasan dan efek ganda (*multiplier effect*) pariwisata wisata kurang baik, terkendala kapasitas, hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya buruk, dan atau menilai bahwa pembangunan kawasan wisata Kedung Ombo tidak dapat memfasilitasi kepentingan bersama. Dari hasil wawancara diketahui bahwa para pemangku kepentingan ini kurang yakin terhadap keberhasilan pengembangan kawasan wisata ini karena selama ini mereka tidak dapat terlibat dalam pemanfaatan kawasan Kedung Ombo disebabkan pihak-pihak tertentu sangat dominan dan cenderung tidak harmonis. Keterbatasan kapasitas baik pada sumber daya manusia pariwisata maupun finansial juga menjadi faktor pemicu.

Bappeda Boyolali dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Boyolali adalah pemangku kepentingan dengan partisipasi 0 (tidak berpartisipasi/tidak), meskipun mempunyai kapasitas dan hubungan dengan pemangku kepentingan yang lain baik. Faktor yang mendorong lembaga ini tidak terlibat dalam pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo adalah tidak tertampungnya kepentingan lembaga ini pada pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo. Pemkab Boyolali saat ini berorientasi pada pengembangan wisata di sisi selatan wilayah (kawasan Kedung Ombo berada di wilayah utara). Hal ini telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah wilayah ini.

Bappeda dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Sragen, Bappeda Grobogan adalah pemangku kepentingan yang mempunyai nilai keterlibatan baik. Hal ini didukung oleh kondisi pola pikir, kapasitas dan keyakinan terhadap kemampuan memenuhi kepentingan bersama baik. Demikian pula Perhutani KPH Telawah, Perhutani KPH Gundih dan masyarakat lokal. Dari pemosisian ini maka lembaga-lembaga inilah yang akan terlibat penuh dalam pengembangan kawasan secara menyeluruh baik pada tahap perencanaan hingga tahap operasionalisasi kawasan.

BBWS Pemali Juana sebagai pengelola waduk mempunyai kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang memadai, namun pada kondisi lain kurang memadai (dibawah *treshold*). Mengingat BBWS sebagai pemangku kepentingan utama, kondisi ini perlu terus disesuaikan demi keberhasilan pengembangan kawasan.

5. KESIMPULAN

Studi ini menyelidiki kondisi yang menentukan minat berpartisipasi pemangku kepentingan pada pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo dengan metode QCA. Minat berpartisipasi pemangku kepentingan ditentukan oleh faktor atau kondisi pola pikir, kapasitas, hubungan dan kepentingan bersama. Terdapat tiga jalur/struktur tingkat partisipasi pemangku kepentingan untuk memfasilitasi keragaman pada kondisi pemangku kepentingan, yaitu (1) untuk menghasilkan minat berpartisipasi harus didukung dengan pola pikir yang benar terhadap pariwisata, kapasitas yang baik dan keyakinan bahwa kawasan wisata mampu memfasilitasi kepentingan bersama; (2). minat untuk berpartisipasi dapat terwujud jika kapasitas pemangku kepentingan baik, meskipun kondisi yang lain kurang; dan (3) minat untuk berpartisipasi harus didukung oleh pola pikir yang benar terhadap pariwisata dan hubungan antar pemangku kepentingan yang baik. Temuan ini berimplikasi pada alternatif yang dapat dipilih untuk membangun dan mengembangkan kondisi yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemangku kepentingan.

Sesuai dengan konsep pembangunan secara partisipatif, keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam memilih alternatif jalur untuk meningkatkan partisipasi sangat diperkukan. Demikian upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kondisi dari beberapa pemangku kepentingan menjadi lebih dari ambang batas. Melalui pemahaman bahwa keberadaan kawasan wisata Kedung Ombo akan meningkatkan kesempatan dalam perbaikan infrastruktur, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah, dapat menjadi motivasi yang baik.

Hasil analisa Tabel Kebenaran menghasilkan tipologi pemangku kepentingan yang beragam mulai dari yang sangat mendukung (1), tidak mendukung (0) dan tidak ada pemangku kepentingan yang kontradiktif (C). Temuan yang mengklasifikasikan pemangku kepentingan pada kluster 0 masih dapat didorong untuk terlibat dalam pengembangan ini. Karena proyek pengembangan kawasan ini bersifat *ex-ante* maka dalam jangka pendek keraguan terhadap keberhasilannya masih cukup menonjol. Tetapi sebagai pihak yang bersama ingin memperbaiki keadaan kawasan Kedung Ombo, maka ide pengembangan ini perlu didukung.

Untuk mendorong minat berpartisipasi maka, maka penting dilakukan beberapa perbaikan pada kondisi-kondisi yang mengakibatkan pemangku kepentingan berada pada tipologi kontradiktif dan tidak berminat untuk berpartisipasi. Kondisi yang terkait dengan pola pikir dapat diperbaiki dengan sosialisasi tentang pentingnya keberadaan pariwisata sebagai alternatif dalam peningkatan infrastruktur, ekonomi dan sosial untuk semua wilayah. Melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan juga dapat dilakukan sebagai cara untuk membuka

cakrawala pemikiran. Pendekatan lain yang lebih terstruktur dapat dilakukan dengan melakukan studi banding di wilayah yang telah berhasil mengembangkan pariwisata berbasis partisipasi.

Untuk meningkatkan kapasitas dapat dilakukan dengan mengembangkan modal ventura dan mengembangkan SDM pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk meningkatkan hubungan antara pemangku kepentingan maka dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal didukung oleh komunikasi yang persuasif. Sedangkan untuk mewujudkan kawasan wisata yang dapat memfasilitasi kepentingan Bersama, maka menerapkan model perencanaan partisipatif dan kemitraan adalah upaya yang dapat ditempuh.

Hasil penelitian ini menjelaskan adanya kebutuhan terhadap pendekatan partisipatif untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat kolaborasi dalam rangka mengatasi kapasitas para pemangku kepentingan yang terbatas. Untuk mendukung pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan saluran komunikasi dan jaringan koordinasi yang efektif melalui pola kemitraan yang didukung oleh proses komitmen kebijakan oleh berbagai lembaga yang kompeten.

Ucapan Terima kasih

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian tentang Model Kelembagaan Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui hibah penelitian desentralisasi tahun jamak 2018-2020. Peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Peneliti juga menyampaikana terima kasih kepada BBWS Pemali Juana, Bappeda Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali atas dukungan dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. C. (2018). *Kamus Rumus Peternakan dan Hewan*. (W. Kurniawan, Ed.). Jakarta: Gallus Indonesia Utama.
- Baggio, R., Scott, N., & Cooper, C. (2010). Improving tourism destination governance: A complexity science approach Article information: *Tourism Review*, (November 2010). <https://doi.org/10.1108/16605371011093863>
- Bramwell, B., & Sharman, A. (1999). Collaboration in local tourism policymaking. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 392-415. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00105-4](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00105-4)
- Charleen, T., & Forbes, K. (2014). Collaboration and stakeholder involvement for tourism development in Zimbabwe. *Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 3(1), 1-9.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluation corporate social performance. *The Academy of Management Review*, 20(1), 92-117.
- Devers, K. J., Lallemand, N. C., Burton, R., Kahwati, L., Mccall, N., & Zuckerman, S. (2013). Using Qualitative Comparative Analysis (QCA) to Study Patient-Centered Medical Homes, (September), 42. Retrieved from <http://www.urban.org/publications/412969.html>
- Donaldson, T. & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *The Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.
- Fathimath, A. (2015). The Role of Stakeholder Collaboration in Sustainable Tourism Competitiveness: The Case of Auckland , New Zealand, (April), 328.
- Fauzi, A. (2019). *Teknik Keberlanjutan* (1st ed.). Jakarta: Gramedia.
- Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*. Jossey-Bass.
- Gregory, A. J., Atkins, J. P., Midgley, G., & Hodgson, A. M. (2020). Stakeholder identification and engagement in problem structuring interventions. *European Journal of Operational Research*, 283(1), 321-340. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.10.044>
- Heger, T., & Rohrbeck, R. (2012). Technological Forecasting & Social Change Strategic foresight for collaborative exploration of new business fields. *Technological Forecasting & Social Change*, 79(5), 819-831. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.11.003>
- Hemaphan, P. (2017). Determinant of Stakeholder Participation Towards Sustainable Tourism Development: An Empirical Study Of Active Beach Destinations In Thailand. *Sripatum Review of Humanities and Social Sciences*, 17(1), 103-114. Retrieved from <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs/article/view/113155%0A>
- Kala, D., & Bagri, S. C. (2018). Barriers to local community participation in tourism development: Evidence from mountainous state Uttarakhand, India. *Tourism*, 66(3), 318-333.
- Kurniasih, D.-. (2017). Model Penguatan Kelembagaan Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Collaborative Governance). *Sosiohumaniora*, 19(1), 1-7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- Leal Filho, W., & Londero Brandli, L. (2016). Engaging stakeholders for sustainable development. *World Sustainability Series*, (January), 335-342. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26734-0_21
- Maiden, J. A. (2008). Participation in Sustainable Tourism Development: Stakeholders & Partnership Working, (March), 327.
- Marzuki, A., Hay, I., & James, J. (2012). Public participation shortcomings in tourism planning: The case of the Langkawi Islands, Malaysia. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(4), 585-602. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.638384>
- McComb, E. J., Boyd, S., & Boluk, K. (2017). Stakeholder collaboration: A means to the success of rural tourism destinations? A critical evaluation of the existence of stakeholder collaboration within the Mourne, Northern Ireland. *Tourism and Hospitality Research*, 17(3), 286-297. <https://doi.org/10.1177/1467358415583738>
- Miller, G., Rathouse, K., Scarles, C., Holmes, K., & Tribe, J. (2010). Public understanding of sustainable tourism. *Annals of Tourism Research*, 37(3), 627-645. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.12.002>

- Ruhanen, L. (2012). Strategic visioning: integrating sustainable development principles into tourism destination planning. *Acta Turistica*, 24(2), 149-176. Retrieved from <https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:271140>
- Siti-Nabiha, A. K., & Md Saad, N. H. (2015). Tourism planning and stakeholders' engagement: The case of Penang Island. *Problems and Perspectives in Management*, 13(2), 269-276.
- Stratigea, A. (2013). Participatory policy making in foresight studies at the regional level: A methodological approach. *Regional Science Inquiry*, 5(1), 145-161.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613-633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493-504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>
- Tosun, C., Hatay, A., & Timothy, D. J. (1998). Shortcomings in planning approaches to tourism development in developing countries: the case of, 352-359.
- Turker, N., Alaeddinoglu, F., & Can, A. S. (2016). The role of stakeholders in sustainable tourism development in Safranbolu, Turkey. *Conference: 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism*, (July), 415-426. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/331000851_The_Role_of_Stakeholders_in_Sustainable_Tourism_Development_in_Safranbolu_Turkey
- Waligo, V. M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2013). Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework. *Tourism Management*, 36, 342-353. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.008>